

Penerapan Agile Governance Terhadap Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Jember

The Application of Agile Governance on the Effectiveness of Local Government Management in Jember Regency

Arya Indy¹, Satria Tata², Akbar maulana³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jember
^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan

e-mail: ¹aryaindy972@gmail.com, ²satriatata789@gmail.com, ³akbar.maulana@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem tata kelola yang lebih adaptif, cepat, dan responsif. Konsep agile governance hadir sebagai pendekatan yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan agile governance di Kabupaten Jember memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengambilan keputusan, serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Namun demikian, penerapan konsep tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, adaptasi teknologi, dan budaya birokrasi yang cenderung konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta peningkatan komitmen kelembagaan agar penerapan agile governance dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Agile Governance, Efektivitas Pemerintahan, Tata Kelola Publik, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The development of information technology and the increasing public demand for quality public services encourage local governments to implement governance systems that are more adaptive, responsive, and flexible. The concept of agile governance emerges as an approach that emphasizes flexibility, collaboration, and the ability of government institutions to adjust policies in response to dynamic social changes. This study aims to analyze the implementation of agile governance toward the effectiveness of local government governance in Jember Regency. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of agile governance in Jember Regency has a positive impact on the effectiveness of governance, particularly in improving public service quality, accelerating decision-making processes, and strengthening coordination among regional government institutions. However, several challenges remain, including limited human resources, technological adaptation issues, and bureaucratic culture that still tends to be conventional. Therefore, strengthening the capacity of government officials, developing

integrated digital systems, and enhancing institutional commitment are necessary to ensure the optimal and sustainable implementation of agile governance.

Keywords: Agile Governance, Government Effectiveness, Public Governance, Local Government

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut menjalankan fungsi administratif secara konvensional, tetapi juga dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinamika sosial yang semakin kompleks menyebabkan pendekatan birokrasi tradisional dinilai kurang mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang bergerak secara dinamis dan penuh ketidakpastian. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penerapan agile governance (Osborne, 2010). Agile governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas organisasi, kemampuan adaptasi kebijakan, kolaborasi antaraktor, serta kecepatan pemerintah dalam merespons perubahan lingkungan strategis. Konsep ini awalnya berkembang

Dalam bidang teknologi dan manajemen organisasi, kemudian diadopsi dalam sektor publik sebagai bentuk reformasi birokrasi yang lebih terbuka dan inovatif (Luna et al., 2015). Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan agile governance menjadi penting karena pemerintah daerah berada pada posisi yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dituntut mampu memahami kebutuhan publik secara cepat dan tepat (Mergel et al., 2018). Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik, koordinasi birokrasi, serta percepatan pengambilan keputusan administratif. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap pola tata kelola yang selama ini cenderung bersifat hierarkis dan prosedural. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjalankan regulasi, tetapi juga harus mampu menciptakan sistem pemerintahan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi (West, 2005).

Penerapan agile governance dalam pemerintahan daerah menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui pendekatan ini, pemerintah diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat koordinasi kelembagaan, serta membangun sistem pengambilan keputusan yang lebih responsif (Dunleavy et al., 2006). Namun demikian, implementasi agile governance di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi budaya birokrasi, rendahnya kapasitas digital aparatur, hingga lemahnya integrasi antarorganisasi pemerintahan (Heeks, 2008). Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan agile governance sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi dalam membangun budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip agile governance secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal reformasi birokrasi dengan realitas implementasi di lapangan (Mergel et al., 2018). Oleh sebab itu, kajian mengenai penerapan agile governance dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam melihat sejauh mana konsep tersebut mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi pemerintahan, khususnya terkait inovasi tata kelola publik, sekaligus menjadi bahan

evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut menjalankan fungsi administratif secara konvensional, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dinamika lingkungan yang semakin kompleks menyebabkan pendekatan birokrasi tradisional dinilai kurang efektif dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penerapan konsep agile governance (Osborne, 2010). Secara teoritis, agile governance merupakan pendekatan yang menekankan fleksibilitas organisasi, adaptasi kebijakan, kolaborasi antaraktor, serta kecepatan dalam pengambilan keputusan (Luna et al., 2015). Konsep ini diperkuat oleh teori manajemen publik modern yang menekankan pentingnya responsivitas dan inovasi dalam sektor publik. Selain itu, teori digital governance juga menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dunleavy et al., 2006).

Dalam konteks ini, agile governance menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui integrasi antara fleksibilitas birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam penelitian ini merujuk pada teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge (2013), yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi diukur dari kemampuan mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam sektor publik, efektivitas dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik, kecepatan pengambilan keputusan, serta tingkat kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan agile governance diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kinerja birokrasi yang lebih adaptif dan responsif. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agile governance memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi publik. Penelitian oleh Mergel et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan prinsip agile dalam sektor publik mampu meningkatkan inovasi dan responsivitas organisasi pemerintah. Selain itu, penelitian Luna et al. (2015) menunjukkan bahwa agile governance dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga. Namun demikian, penelitian Heeks (2008) menemukan bahwa implementasi inovasi digital dalam pemerintahan sering mengalami kegagalan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan organisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan agile governance sangat bergantung pada kesiapan institusi dan kapasitas aparatur pemerintah. Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal efektivitas pelayanan publik, koordinasi birokrasi, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengimplementasikan pendekatan tata kelola yang lebih inovatif dan adaptif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti budaya birokrasi yang kaku, keterbatasan kapasitas digital, serta lemahnya integrasi antarorganisasi pemerintahan yang dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, dapat disusun kerangka berpikir bahwa penerapan agile governance sebagai variabel independen memiliki hubungan dengan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah sebagai variabel dependen. Agile governance yang ditandai dengan fleksibilitas organisasi, kolaborasi, adaptasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi digital diyakini dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan yang tercermin dari peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, semakin baik penerapan agile governance, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Berdasarkan

uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan serta kontribusi praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed methods) yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode gabungan dipilih karena penelitian mengenai penerapan agile governance terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah memerlukan analisis yang tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga interpretatif terhadap berbagai fenomena tata kelola pemerintahan yang berkembang di lingkungan birokrasi daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan sequential explanatory. Pendekatan ini dilakukan melalui pengolahan data kuantitatif sebagai dasar analisis awal, kemudian diperkuat dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian. Kombinasi kedua pendekatan tersebut digunakan agar penelitian mampu menjelaskan hubungan antara penerapan agile governance dengan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara lebih sistematis.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan fokus kajian pada tata kelola pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan inovasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan reformasi administrasi pemerintahan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang terus melakukan penyesuaian tata kelola pemerintahan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasi agile governance di lingkungan pemerintahan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan kelembagaan, data statistik pemerintahan, jurnal ilmiah, buku, regulasi, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip pemerintahan, laporan kebijakan, data kelembagaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan agile governance dan efektivitas pemerintahan daerah. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif terhadap data yang diperoleh dari dokumen dan data pemerintahan yang relevan dengan indikator efektivitas tata kelola pemerintahan. Analisis tersebut digunakan untuk melihat kecenderungan, perkembangan, serta tingkat efektivitas implementasi agile governance di Kabupaten Jember. Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dan kajian literatur. Dalam menjaga validitas data penelitian, dilakukan proses triangulasi data melalui perbandingan antara dokumen resmi, data statistik, regulasi, serta berbagai sumber ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Langkah tersebut dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Agile Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penerapan agile governance dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember pada dasarnya menunjukkan adanya upaya

transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Transformasi tersebut terlihat melalui penguatan digitalisasi administrasi pemerintahan, penyesuaian mekanisme pelayanan publik, serta upaya peningkatan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Dalam konteks pemerintahan modern, perubahan tersebut menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena birokrasi konvensional dinilai semakin sulit menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan cepat, transparan, dan efisien (Mergel, Gong, & Bertot, 2018). Lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah berada pada tahap awal transisi menuju tata kelola yang lebih adaptif, meskipun perubahan yang terjadi masih bersifat instrumental. Artinya, penggunaan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan pola kerja dan budaya organisasi birokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi agile governance di Kabupaten Jember masih berada pada level administratif, belum mencapai transformasi struktural yang menyentuh nilai, norma, dan perilaku aparatur pemerintahan secara menyeluruh.

Secara substantif, penerapan agile governance tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, melainkan juga menyangkut perubahan paradigma birokrasi dari sistem yang bersifat administratif menuju tata kelola yang lebih fleksibel dan responsif. Pemerintah daerah mulai didorong untuk meninggalkan pola kerja yang terlalu hierarkis dan prosedural karena model birokrasi tersebut sering kali menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lambat (Ansell & Torfing, 2014). Dalam kondisi tertentu, birokrasi yang terlalu formal justru menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi kurang efektif. Dalam konteks ini, dapat dianalisis bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan sistem atau teknologi, melainkan pada resistensi perubahan dalam birokrasi itu sendiri. Perubahan menuju agile governance menuntut adanya keberanian institusi untuk mengurangi rigiditas prosedural dan memberikan ruang diskresi yang lebih luas kepada aparatur, sesuatu yang belum sepenuhnya berkembang dalam birokrasi daerah. Di Kabupaten Jember, penerapan agile governance dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pelayanan berbasis digital sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan. Kehadiran sistem digital memberikan pengaruh terhadap percepatan proses pelayanan dan efisiensi birokrasi karena beberapa layanan publik mulai terintegrasi melalui sistem administrasi elektronik. Akan tetapi, transformasi digital tersebut belum sepenuhnya menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan (Dunleavy et al., 2006).

Secara analitis, kondisi ini memperlihatkan adanya fenomena “digitalisasi tanpa transformasi”, di mana teknologi hanya digunakan untuk mempercepat proses lama tanpa mengubah struktur dan pola kerja birokrasi. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas agile governance karena esensi utama dari konsep tersebut adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, bukan sekadar modernisasi alat kerja. Problematika Struktural dalam Implementasi Agile Governance Implementasi agile governance di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang berkaitan dengan karakter birokrasi pemerintahan daerah. Salah satu persoalan utama terletak pada kuatnya budaya birokrasi hierarkis yang masih mempertahankan pola kerja formalistik dan sentralistik, sehingga proses pengambilan keputusan berjalan lambat (Weber, 1978). Akibatnya, fleksibilitas organisasi dalam merespons perubahan sosial maupun kebutuhan masyarakat menjadi terbatas. Dari sudut pandang analisis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip agile governance yang menekankan kecepatan dan fleksibilitas dengan realitas birokrasi yang masih kaku. Dengan kata lain, struktur organisasi yang terlalu hierarkis menjadi penghambat utama dalam implementasi konsep tersebut. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga restrukturisasi organisasi yang lebih datar (flat organization) agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif.

Selain itu, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis agile governance juga menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan. Integrasi antarorganisasi perangkat daerah belum berjalan secara optimal karena masing-masing instansi masih bekerja berdasarkan orientasi sektoral (Osborne, 2010). Hal ini menyebabkan fragmentasi kebijakan publik yang berdampak pada rendahnya efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Secara kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antarinstansi masih

bersifat formalitas dan belum menjadi budaya kerja yang melekat. Padahal, dalam agile governance, kolaborasi merupakan elemen kunci untuk menciptakan respons kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Tanpa adanya integrasi yang kuat, maka inovasi pelayanan publik akan berjalan parsial dan tidak berkelanjutan. Permasalahan lain yang cukup dominan berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan. Rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi menyebabkan implementasi inovasi pelayanan publik tidak merata (Mergel et al., 2018). Dalam perspektif analisis, hal ini menegaskan bahwa keberhasilan agile governance sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

Transformasi digital tanpa diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparatur hanya akan menghasilkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif. Analisis Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam perspektif agile governance tidak hanya diukur melalui percepatan pelayanan administratif, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah dalam menciptakan sistem yang adaptif, kolaboratif, dan responsif (Pollitt & Bouckaert, 2017). Dalam konteks Kabupaten Jember, penerapan agile governance memang menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pelayanan publik, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun demikian, secara analitis dapat dipahami bahwa efektivitas tersebut masih bersifat jangka pendek dan administratif. Hal ini karena perubahan yang terjadi belum menyentuh aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan, seperti budaya organisasi, pola kepemimpinan, dan sistem pengambilan keputusan. Dengan demikian, peningkatan efisiensi belum tentu mencerminkan keberhasilan implementasi agile governance secara menyeluruh. Digitalisasi birokrasi tidak selalu identik dengan terciptanya agile governance. Dalam beberapa kondisi, teknologi hanya mempercepat proses tanpa mengubah struktur kekuasaan dalam birokrasi (Dunleavy et al., 2006). Akibatnya, pelayanan publik menjadi lebih cepat, tetapi tetap tidak fleksibel. Dalam konteks ini, dapat dianalisis bahwa keberhasilan agile governance sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi budaya organisasi. Tanpa adanya perubahan pola pikir (mindset) aparatur, maka inovasi yang dilakukan hanya akan bersifat kosmetik dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, penerapan agile governance juga menuntut adanya perubahan pola kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada hierarki administratif cenderung menghambat fleksibilitas organisasi, sedangkan agile governance menuntut kepemimpinan yang kolaboratif dan partisipatif (Ansell & Gash, 2008). Secara lebih mendalam, hal ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi agile governance. Pemimpin yang adaptif akan mampu mendorong inovasi, memperkuat kolaborasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, efektivitas tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dalam mengelola perubahan birokrasi.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan agile governance dalam tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember menunjukkan adanya upaya transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis teknologi. Implementasi konsep tersebut terlihat melalui pengembangan pelayanan publik berbasis digital, percepatan administrasi pemerintahan, serta peningkatan efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Kehadiran agile governance menjadi bagian dari tuntutan reformasi birokrasi modern yang menekankan fleksibilitas dan kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika sosial secara cepat. Meskipun demikian, implementasi agile governance di Kabupaten Jember belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat berbagai hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi pemerintahan daerah, seperti kuatnya budaya kerja hierarkis, lemahnya integrasi kelembagaan, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan agile

governance lebih banyak berorientasi pada modernisasi administrasi dibandingkan transformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Secara substantif, efektivitas tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam membangun budaya organisasi yang kolaboratif, inovatif, dan terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, penerapan agile governance di Kabupaten Jember memerlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan integrasi antarinstansi pemerintahan, serta perubahan pola kepemimpinan birokrasi agar reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Riant Nugroho. (2021). Public policy: Dinamika kebijakan publik di negara berkembang. Elex Media Komputindo.
- Dwiyanto Agus. (2020). Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif. Gadjah Mada University Press.
- Stephen Denning. (2018). The age of agile: How smart companies are transforming the way work gets done. AMACOM.
- David Osborne., & Ted Gaebler. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
- Jan Kooiman. (2003). Governing as governance. Sage Publications.
- Christopher Hood. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Thomas Bingham., Tina Nabatchi., & Rosemary O'Leary. (2005). The new governance: Practices and processes for stakeholder and citizen participation in the work of government. *Public Administration Review*, 65(5), 547–558.
- OECD. (2021). Government at a glance 2021. OECD Publishing.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2014). Public innovation through collaboration and design. Routledge.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Sage Publications.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is Dead Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Mergel, I., Gong, Y., & Bertot, J. (2018). Agile government: Systematic literature review and future research. *Government Information Quarterly*, 35(2), 291–298.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). Public management reform: A comparative analysis (4th ed.). Oxford University Press.
- Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press